

Judul : Aceh minta bantuan PBB, DPR anggap wajar demi kemanusiaan
Tanggal : Rabu, 17 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Aceh Minta Bantuan PBB

DPR Anggap Wajar Demi Kemanusiaan

SENAYAN menyoroti surat permintaan bantuan Pemerintah Aceh kepada beberapa lembaga Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil mengatakan, tidak ada hal luar biasa dalam surat yang dikirim Aceh ke Badan Program Pembangunan (UNDP) dan Badan Perlindungan Anak-anak (UNICEF) itu. Setiap tahun, dua lembaga PBB itu memang memiliki program di Provinsi Serambi Mekkah.

"Karena itu, sangat wajar kalau Pemerintah Aceh menyurati kedua lembaga itu untuk membantu menanggulangi pascabencana di Sumatera dan khususnya di Aceh," kata legislator PKS asal Aceh itu di Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Nasir memastikan, permintaan bantuan ke UNDP dan UNICEF semata-mata hanya berdasarkan misi kemanusiaan. Pemerintah Pusat bakal bisa memahaminya, serta tidak mempersulit bantuan yang akan masuk.

"Solidaritas kemanusiaan antar warga negara tak mungkin dicegah. Pusat harus memfasilitasi agar rakyat Aceh merasa terhibur dibantu saudara se-Tanah Air dan juga dari luar," tambahnya.

Senada, rekan separtai Nasir, Mardani Ali Sera menilai, permintaan masyarakat Aceh itu wajar. Karena bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda

wilayah itu terbilang dahsyat. Jumlah korban dan dampaknya sangat berat buat masyarakat. Makanya, wajar masyarakat Aceh berharap segera dapat bantuan, termasuk dari luar negeri.

Dia meminta Pemerintah melakukan manajemen bencana yang berpihak pada warga terdampak. Antara lain dengan memfokuskan bantuan pada pemulihan sekolah, masjid, pasar, sawah hingga listrik yang hilang. Selain itu, infrastruktur termasuk jalan, air bersih hingga gas juga perlu segera dibuat normal.

"Kami berharap Pemerintah terbuka menerima bantuan dari negara lain, dan yang terpenting bantuan itu bisa dikelola dengan jelas dan profesional," katanya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf Macan Effendi menambahkan, permintaan itu tidak perlu dijadikan bahan perdebatan. Karena yang paling penting saat ini adalah nyawa masyarakat di Aceh bisa tertolong. Dalam kondisi bencana siapa pun boleh meminta bantuan dari siapa saja.

"Namun kondisi medan yang sulit membuat bantuan susah tembus. Artinya Pemda pasti berusaha semaksimal mungkin mendapat bantuan dari mana saja," kata Dede Yusuf kepada wartawan, Selasa (16/12/2025).

Dede meyakini, Pemerintah



Nasir Djamil

Pusat juga telah berupaya maksimal dalam menangani bencana di Aceh. Termasuk dari Presiden Prabowo Subianto yang sudah melakukan upaya maksimal menangani kondisi. Selanjutnya, yang paling penting adalah ada komunikasi terhadap Pemerintah Pusat terkait bantuan yang masuk.

"Asal ada pemberitahuan kepada Pemerintah Pusat, dan menjelaskan alasan yang tepat dibutuhkan saat ini. Karena itu bagian dari koordinasi dengan pusat," tegas legislator Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menilai, sikap Pemerintah Aceh itu sebagai sebuah langkah inisiatif untuk mempercepat dukungan bagi masyarakat. Dua lembaga yang dituju memang memiliki mandat

kemanusiaan dan pengalaman yang panjang. Kendati demikian, setiap kerja sama internasional mesti melibatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.

Legislator Partai Golkar itu juga mengingatkan. Pemerintah Pusat mesti menaruh prioritas pada pemulihan bencana di Aceh, termasuk ke Sumatera Utara hingga Sumatera Barat. Karena, koordinasi yang baik dari semua pihak akan mempercepat proses pemulihan.

"Komisi I DPR menekankan agar seluruh upaya Pemerintah Pusat, daerah, dan mitra internasional diarahkan untuk memastikan pemulihan kehidupan warga berlangsung secara normal, aman, dan berkelanjutan," katanya.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA memastikan pihaknya secara resmi telah melayangkan surat permintaan bantuan pada UNDP dan UNICEF untuk penanganan pasca-banjir dan longsor yang terjadi di Tanah Rencong. Permintaan itu atas pertimbangan pengalaman bencana tsunami 2004.

Menurutnya, berbagai langkah kebijakan strategis dalam upaya pemulihan Aceh akan terus dilakukan atas supervisi Pemerintah Pusat. Saat ini tercatat 77 lembaga mengikutsertakan 1.960 relawannya dalam

upaya pemulihan bencana Aceh. Keikutsertaan lembaga beserta relawannya tersebut tercatat pada Desk Relawan BNPB dan Posko Aceh.

"Mereka merupakan lembaga atau NGO lokal, nasional, dan internasional serta keterlibatan relawan dan lembaga diperkirakan akan terus bertambah," terangnya.

Terkait permintaan itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengaku belum membaca surat Gubernur Aceh Muzakir Manaf pada dua lembaga tersebut. Dia mengatakan akan mempelajari lebih dulu apakah kepala daerah diizinkan untuk meminta bantuan dari luar saat Pemerintah mengklaim mampu melakukan penanganan dengan mandiri.

"Saya belum baca, nanti kita pelajari. Saya belum tau bentuk bantuannya seperti apa," ujar Tito, Selasa (16/12/2025).

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengaku menerima tawaran dari berbagai negara untuk turut membantu dalam penanganan dampak bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi Sumatera, akhir November lalu. Namun, dia menolak seluruh tawaran dengan menyatakan Pemerintah mampu mengatasi dampak bencana. ■ PYB